

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS .....	iii
KATA PENGANTAR .....	v
ABSTRAK .....	vi
DAFTAR ISI .....	viii
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN .....	x
DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	8
1.3 Tujuan Penelitian .....	8
1.4 Manfaat Penelitian .....	8
1.5 Metode Penelitian .....	9
1.5.1 Tipe Penelitian Hukum .....	9
1.5.2 Pendekatan Masalah .....	9
1.5.3 Sumber Bahan Hukum .....	10
1.5.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum .....	12
1.5.5 Analisis Bahan Hukum .....	12
1.6 Sistematika Penulisan .....	13
<b>BAB II KONSEP SAKSI MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN</b>	
2.1 Konsep Saksi Pelapor ( <i>Whistleblower</i> ) .....	14
2.2 Saksi Menurut Peraturan Perundang-undangan .....	17

2.2.1 Saksi Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)	17
2.2.2 Saksi Menurut Undang-Undang No. 31 Tahun 2014	21
2.2.3 Saksi Menurut Undang-Undang No. 31 Tahun 1999	21

**BAB III PERLINDUNGAN HUKUM SAKSI PELAPOR TINDAK PIDANA KORUPSI  
DALAM KONTEKS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

3.1 Perlindungan Saksi Pelapor ( <i>Whistleblower</i> ) Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	24
3.2 Anotasi Putusan Nomor 03/Pid.Pra//2017/PN.Wgp	29
3.3 Analisis Putusan Nomor 03/Pid.Pra//2017/PN.Wgp	34
3.4 Instrumen Perlindungan Hukum Saksi Pelapor ( <i>Whistleblower</i> ) Tindak Pidana Korupsi	41

**BAB IV KESIMPULAN**

4.1 Kesimpulan	52
4.2 Saran	53

**DAFTAR BACAAN**

## **DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 Tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 127 Tahun 1958, Tambahan Lembaran Negaran Republik Indonesia Nomor 1660.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1981, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 134 Tahun 2001, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4150.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)*; 2003, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2006, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4620.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Lembaran Negara Nomor 294 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5602.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2018, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6250.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (Justice Collaborators) Di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.

Peraturan Peraturan LPSK No. 6 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pemberian Perlindungan Saksi dan Korban.

## **DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN**

Putusan Nomor: 03/Pid.Pra/2017/PN.Wgp.